

**LAPORAN
PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Kebijakan dan Kelembagaan: Pembangunan Kapasitas Pendidikan Tingkat
Menengah Menyongsong Era Disrupsi 4.0 di Provinsi Lampung**

TIM PENGUSUL

Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A

NIDN: 0028068102 Sinta ID: 38362

Devi Puspita Sari	NPM: 2016041029
Riki Ariadi	NPM: 2016041046
Oksavia Nandini	NPM: 20116041034
Elizabet Lili Suasha	NPM: 2016041030
Halwa Anjumi Tanawar	NPM: 2016041064
Fenita Angkuna	NPM: 2016041069
Alyaa Suci Nursyahbani	NPM: 2016041070
Raihan Adli	NPM: 2016041005
Wikke Widya Ariyani	NPM: 2016041032
Arsyah Fernanda K	NPM: 2016041027

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MBKM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	: Kebijakan dan Kelembagaan: Pembangunan Kapasitas Pendidikan Tingkat Menengah Menyongsong Era Disrupsi 4.0 di Provinsi Lampung
Manfaat sosial ekonomi	: Mendorong Kebijakan Publik yang efektif.
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A.
b. NIDN	: 0028068102
c. SINTA ID	: 38362
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Jurusan Administrasi Negara
f. Nomor HP	: 082112928279
g. Alamat surel (e-mail)	: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Devi Puspita Sari
b. NPM	: 2016041029
c. Email	: devip4162@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Riki Ariadi
b. NPM	: 2016041046
c. Email	: rikiaridixd@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Oksavia Nandini
b. NPM	: 20116041034
c. Email	: oksavianandini@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (4)	
a. Nama Lengkap	: Elizabet Lili Suasha
b. NPM	: 2016041030
c. Email	: elizabetliliuasha@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (5)	
a. Nama Lengkap	: Halwa Anjumi Tanawar
b. NPM	: 2016041064
c. Email	: halwatananwar@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (6)	
a. Nama Lengkap	: Fenita Angkuna
b. NPM	: 2016041069
c. Email	: fenithae02@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (7)	
a. Nama Lengkap	: Alyaa Suci Nursyahbani
b. NPM	: 2016041070
c. Email	: alyasuci03@gmail.com
d. Program Studi	: Administrasi Negara

Anggota Peneliti (7)

- a. Nama Lengkap : Raihan Adli
- b. NPM : 2016041005
- c. Email : raihan.adli203@gmail.com
- d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota Peneliti (7)

- a. Nama Lengkap : Wikke Widya Ariyani
- b. NPM : 2016041032
- c. Email : wikkewidyaa213@gmail.com
- d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota Peneliti (7)

- a. Nama Lengkap : Arsyah Fernanda K
- b. NPM : 2016041027
- c. Email : arsyah.fernanda9@gmail.com
- d. Program Studi : Administrasi Negara

- Jumlah mahasiswa yang terlibat : 12 orang
- Jumlah alumni yang terlibat : 2 orang
- Jumlah staf yang terlibat : 1 orang
- Mitra terlibat : BAN SM Provinsi Lampung
- Lokasi penelitian : Provinsi Lampung
- Lama kegiatan : 6 Bulan
- Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000
- Sumber dana : DIPA BLU Unila 2022

Bandar Lampung, 12 September 2022

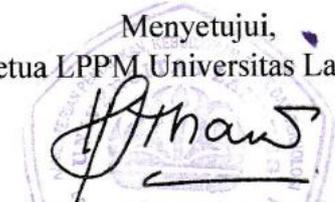
Mengetahui,
Ketua Program Studi


Meiliyanti, S.IP., MA
NIP. 19740520 200112 2 002

Penanggung Jawab MK. Komunikasi &
Advokasi Kebijakan Publik


(Simon S. Hutagalung, M.P.A)
NIP/NIK 198106282005011003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung


(Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A)
NIP/NIK 196505101993032008

Ketua Peneliti


(Simon S. Hutagalung, M.P.A)
NIP/NIK 198106282005011003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	ii
BAB I. LATAR BELAKANG	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
<i>State of the art</i>	5
Penelitian Terdahulu	17
Peta jalan (<i>road map</i>).	17
BAB III. METODE	19
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
DAFTAR PUSTAKA	51

RINGKASAN

Riset ini akan berusaha mengimpun rangkaian analisa terhadap aspek kebijakan dan kelembagaan yang menunjang upaya pembangunan pendidikan dari pemerintah daerah dan pelaku pendidikan lainnya. Selain itu juga akan menarik jika dilihat secara terkait dengan latar lingkungan yang sedang mengalami perubahan berupa disrupsi 4.0. Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan: 1) Bagaimanakah perkembangan isu disrupsi pendidikan dalam kajian ilmiah di Indonesia; 2) Bagaimanakah kondisi existing komponen sumber daya pendidikan menengah pertama di provinsi Lampung?; 3) Apa saja format kebijakan unggulan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung?, 4). Apa saja upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Lampung?, 5). Bagaimanakah model pembangunan kapasitas pendidikan tingkat menengah dalam menyongsong era disrupsi 4.0?. Temuan riset ini diharapkan dapat menghasilkan temuan berupa uraian, pemetaan dan model pembangunan kapasitas pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

Sementara kontribusi riset ini terhadap ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan dan kelembagaan pendidikan yang merupakan salah satu bagian atraktif dari kajian Ilmu Administrasi Publik. Adapun mitra dalam penelitian ini adalah Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method yang mengkombinasi teknik kualitatif dan teknik kuantitatif dengan paradigma kualitatif. Data kuantitatif yang hendak digunakan mencakup data statistik pendidikan dari BPS dan instansi sejenis, sementara data kualitatif yang hendak digunakan meliputi wawancara, observasi dan analisis teks. Selanjutnya, data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun model konseptual. Sementara itu, keluaran dari penelitian ini antara lain: a). artikel ilmiah yang dipresentasikan di konferensi internasional yang diselenggarakan LPPM; b). Catatan harian pelaksanaan penelitian/logbook yang setara dengan 16 kali tatap muka perkuliahan; dan c). Hasil uji TKT yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang menunjukkan hasil penelitian berada di level TKT 1-3.

Kata Kunci: Disrupsi 4.0, Kebijakan Pendidikan, Desentralisasi Pendidikan, Kelembagaan Pendidikan.

BAB I. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu keadaan sesuatu pada area tertentu tidak mudah berubah kecuali dalam waktu yang relatif lama dalam suasana birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu penyebab terpuruknya kualitas pendidikan nasional. Sistem birokratis selalu menempatkan kekuasaan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang menggurita sejak tingkat pusat hingga tingkat daerah bahkan terkesan semakin buruk di era desentralisasi ini (Sirozi, 2003).

Berbagai laporan baik ditingkat internasional maupun regional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia selalu menempati posisi nomor sepatu. Dalam laporan survei UNDP tahun 1991, *Human Development Index* (HDI) Indonesia menempati peringkat ke 76 dari 230 negara, tahun 1997 peringkat ke 96 dari 174 Negara, tahun 2000 peringkat ke 102, tahun 2002 peringkat ke 109 dari 174 negara, 2003 peringkat ke 112 dari 174 negara. Studi kemampuan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh IEA tahun 2000 melaporkan bahwa siswa SD Indonesia berada pada urutan ke 38 dari 39 negara. Sementara itu kemampuan matematika siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Indonesia berada pada posisi ke 39 dari 42 negara. Untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), siswa SLTP Indonesia menempati urutan ke 40 dari 42 negara peserta. *The Third International Mathematics and Science Compared to Other Countries* (2002). Melaporkan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam bidang studi matematika hanya menempati peringkat ke 39 dari 42 negara peserta yang diteliti. Sedang di bidang Sains (Fisika, Biologi, Kimia dan Geografi), siswa Indonesia menempati peringkat ke 40 dari 42 negara.

Bagaimana kondisi mutu pendidikan di Lampung?. Masalah yang juga cukup memprihatinkan di Provinsi Lampung adalah tingginya angka putus sekolah untuk golongan SD

dan SMP. Pada tahun 2017 saja tercatat sekitar 60 ribu anak SD di Lampung yang terpaksa putus sekolah (BPS Lampung, 2021). Ada berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan karena mengingat dekatnya Lampung ke pusat ibu kota dan lancarnya roda perekonomian Lampung. Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-SM) menyebutkan, mutu pendidik dan tenaga pendidikan (PTK), serta Sarana Prasarana (Sarpras) di Lampung masih rendah. Hal tersebut diungkapkan Ketua BAN-SM Lampung Prof. Dr. H. Karwono merujuk kepada hasil laporan akreditasi setiap tahun, sebanyak 1.902 sekolah yang diakreditasi, rata-rata nilai standar PTK dan Sarpras terendah dari 6 standar nasional pendidikan lainnya. Lemahnya dua standar itu terjadi di masing-masing jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (radarlampung, 2019). Untuk itu, peningkatan status akreditasi diharapkan meningkat agar tercapainya mutu pendidikan di Lampung. Di mana, peningkatan PTK dapat dilakukan melalui pemenuhan kualifikasi, sertifikasi, latar belakang pendidikan, kompetensi, serta rasio tenaga pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan serta laboran. Keseluruhan komponen kapasitas tersebut nantinya akan terpotret dalam dokumen index pembangunan manusia yang setiap tahun dikelola BPS. Pada tahun 2021 tercatat hasil identifikasi IPM tersebut pada gambar berikut:



Gambar 1. Index Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari hasil analisis BPS Provinsi Lampung diketahui jika indeks pembangunan manusia di wilayah ini sedikit meningkat, walaupun masih berada dibawah rata-rata nasional (BPS Lampung, 2021). Dalam sektor pendidikan terlihat angka rata-rata lama sekolah yang hanya 8,08 tahun dan angka harapan lama sekolah yang hanya 12,73 tahun. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di sektor pendidikan masih dominan berada pada pendidikan dasar. Padahal masa depan akan semakin membutuhkan daya saing dan daya kompetisi pada aspek sumber daya manusia terdidiknya. Oleh karena itu, riset ini akan berusaha mengimpun rangkaian analisa terhadap aspek kebijakan dan kelembagaan yang menunjang upaya pembangunan pendidikan dari pemerintah daerah dan pelaku pendidikan lainnya. Selain itu juga akan menarik jika dilihat secara terkait dengan latar lingkungan yang sedang mengalami perubahan berupa disrupsi 4.0. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

Permasalahan: 1) Bagaimanakah perkembangan isu disrupsi pendidikan dalam kajian ilmiah di Indonesia; 2) Bagaimanakah kondisi existing komponen sumber daya pendidikan menengah pertama di provinsi Lampung?; 3) Apa saja format kebijakan unggulan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung?, 4). Apa saja upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Lampung?, 5). Bagaimanakah model pembangunan kapasitas pendidikan tingkat menengah dalam menyongsong era disrupsi 4.0?.

Tujuan khusus: 1) Menguraikan perkembangan isu disrupsi pendidikan dalam kajian ilmiah di Indonesia; 2) Mengidentifikasi kondisi existing komponen sumber daya pendidikan menengah pertama di provinsi Lampung; 3) Menganalisis dan evaluasi format kebijakan unggulan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung, 4). Mengidentifikasi dan menganalisis upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi

Lampung, 5). Merumuskan dan membangun model pembangunan kapasitas pendidikan tingkat menengah dalam menyongsong era disrupsi 4.0.

Urgensi penelitian: Pembangunan kapasitas pendidikan merupakan upaya berkelanjutan yang harus senantiasa didukung oleh seluruh stakeholder pendidikan. Tantangan perubahan menyeluruh dalam gelombang disrupsi 4.0 menjadi pemicu untuk mengevaluasi dan mencermati kembali upaya dimasa lalu yang harus disesuaikan atau dioptimalkan guna mencapai kondisi kapasitas pendidikan yang lebih baik. Model ini dapat menjadi rekomendasi bagi penguatan kapasitas pembangunan pendidikan di provinsi Lampung.

Temuan: Riset ini diharapkan dapat menghasilkan temuan berupa uraian, pemetaan dan model pembangunan kapasitas pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

Kontribusi Ilmu Pengetahuan: Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan dan kelembagaan pendidikan yang merupakan salah satu bagian atraktif dari kajian Ilmu Administrasi Publik.

Mitra: Mitra dalam penelitian ini adalah Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Provinsi Lampung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

State of the art

Tinjauan Paradigma Baru Pendidikan Nasional

Menurut Hidayat (2000), setidaknya ada tiga alasan utama diterapkannya otonomi daerah, yaitu; (1). *political equality*, guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah dalam rangka meningkatkan demokratisasi dalam mengelola negara, (2) *Local accountability*, guna meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah, (3) *Local Responsiveness*, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah social ekonomi yang terjadi di daerahnya (Aziz et al., 2020).

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, dari sentralisasi kepada desentralisasi pendidikan. Dengan paradigma baru ini, diharapkan pemerintah pusat tidak lagi melakukan *hegemoni* terhadap kebijakan pendidikan, tetapi lebih diserahkan kepada kepala sekolah, yang mengetahui proses kondisi di lapangan/sekolah, sudah siapkah kader kepala sekolah untuk mampu mengimplementasikan hal itu. Salah satu langkah yang telah ditempuh ke arah desentralisasi pendidikan itu adalah digesernya paradigma manajemen berbasis pusat kepada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Achadah, 2019). Masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan berkepentingan akan keberhasilan pendidikan, karena mereka adalah pembayar pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui pajak. Sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab pada masyarakatnya (Patras et al., 2019). Entitas *stakeholder* yang sangat kompleks dan tak terbatas itu kemudian disederhanakan agar memudahkan sekolah berinteraksi dengannya. Penyederhanaan itu dimaksudkan sebagai perwakilan *stakeholder*.

Dalam konteks era pendidikan sekolah masyarakat sebagai buah reformasi yang lalu dibidang pendidikan pada satu sisi patut disyukuri, tetapi pada sisi lainnya tampak kasat mata masih tetap harus diperjuangkan secara terus menerus dan konsisten dengan komitmen dan moralitas tinggi, hingga perubahan-perubahan yang terjadi dapat dikawal perubahannya, bukan perubahan-perubahan yang terjadi memimpin perubahannya (Lasmawan, 2019). Oleh karena itu untuk dapat memimpin perubahan-perubahan yang terjadi, harus dapat memahami situasi dan kondisi zamannya dengan berbagai perubahan yang terjadi didalamnya dan pergeseran berbagai paradigma pendidikan dari yang lama ke paradigma pendidikan baru.

Dalam memahami paradigma pendidikan baru ini jika dibandingkan dengan paradigma sebelumnya ada 15 paradigma pendidikan baru dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Dari subordinasi menuju otonomi

Manajemen yang serba sentralistis menjadikan sekolah sebagai sub-ordinasi dari pemerintah/ pendidikan tingkat pusat. Proses pendidikan yang dijalankan dengan *undermanaged* dengan pendekatan sarwanegara (*state-driven*) telah menempatkan sekolah pada posisi yang marginal tidak berdaya, tidak memiliki keberanian moral (prakarsa) untuk berinisiatif melakukan inovasi-inovasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Radinal, 2021). Sekolah juga menjadi tidak mandiri, terjadi penyumbatan dan bahkan pemasangan demokrasi. Sekolah tidak peka dan jeli dalam menangkap permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi pendidikan dari masyarakat sebagai *stakeholder*. Pada pendekatan baru dengan konsep MBS sekolah diberikan suatu peluang dengan konsep otonom pendidikan pada tingkat sekolah untuk berbuat yang terbaik bagi sekolah. Sekolah harus bersifat professional dengan suatu kemauan dan keyakinan bahwa perubahan pendidikan tidak akan terjadi jika sekolahnya sendiri tidak berubah (Anggraini et al., 2018).

2. Dari pengambilan keputusan terpusat ke pengambilan keputusan partisipasi

Keputusan yang diambil secara sentralistik cenderung menyeragamkan kebijakan untuk semua sekolah, pada hal situasi dan kondisi masing-masing sekolah itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan pendekatan konsep MBS dan implementasinya dimana keterlibatan setiap warga sekolah dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, sehingga menghasilkan keputusan yang partisipatif. Essensi proses pengambilan keputusan partisipatif adalah untuk mencari wilayah kesamaan antara kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah *Stakeholder*, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orangtua siswa dan pemerintah atau yayasan. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana setiap warga sekolah misalnya guru, siswa, pegawai, dan orangtua siswa dan masyarakat sekitarnya, didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, untuk memberikan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan sekolah yang sudah barang tentu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sebab tujuan pendidikan nasional itu tercapai bila sekolah telah dapat pula mencapai tujuannya (Anggraini et al., 2018).

3. Dari ruang gerak kaku menuju ruang gerak luwes

Pendidikan yang dikelola secara sentralistik telah menjadikan ruang gerak sekolah menjadi kaku. Kekakuan itu dapat dilihat dari orientasinya yang sangat normatif karena terlalu banyak lapis-lapis birokrasi. Birokrasi mengendalikan fungsi, bukan fungsi yang mengendalikan birokrasi, *Uniformitas* telah memasuk kreativitas, dan tradisi secara seremonial yang penuh kepalsuan sudah menjadi kebiasaan (Salsabila et al., 2020). Pada pendekatan MBS ruang sekolah sangat luwes karena sebagian besar pengambilan kebijakan diserahkan kepada sekolah. Hal ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola seluruh potensi yang ada di sekolahnya

dengan konteks sosial, geografis, dan teknologi lokal dan ekonomi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang memanusiakan manusia.

4. Dari pendekatan birokrasi menuju pendekatan profesionalisme

Pola sentralistik menjadikan eksistensi birokrasi lebih dominan dari pada tanggung jawab professional, sehingga kreativitas sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya terpasung dan terbunuh. Misalnya seperti pada proses belajar mengajar yang diselenggarakan guru di kelas atau di sekolah tidak lebih mementingkan jawaban soal secara baku yang dianggap benar oleh guru, karena siswa tidak terbiasa dengan mengembangkan dan membandingkan dengan daya kreasi, nalar, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak ada toleransi terhadap kekeliruan akibat kreativitas berpikir, karena yang benar adalah apa yang dipresentasikan oleh guru, padahal, proses belajar mengajar atau pembelajaran yang semestinya lebih memungkinkan proses pencarian jawaban dibandingkan memiliki jawaban (Mastuhu, 2005).

5. Dari manajemen sentralistik menuju manajemen desentralistik

Pendidikan yang diatur secara sentralistik telah menimbulkan fenomena-fenomena yang disfungsi dimana sekolah menjadi tidak berdaya untuk melaksanakan fungsinya yang sesungguhnya, tetapi di dalam manajemen desentralistik diharapkan lebih memiliki kecenderungan memberikan keluwesan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sekolah. Dengan pendekatan desentralistik ini, dimungkinkan bahwa sekolah lebih dapat berdaya di semua sisi diantaranya sekolah dapat mengambil keputusan-keputusan yang dibuat dan diambil diharapkan menjadi efektif dan efisien (Mantja, 2016). Dalam hal ini, Ivan Illich menulis bahwa lembaga-

lembaga pendidikan yang sentralistik malah menghancurkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga. Menurut M. Sirozi (2004), paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang baru bagi dunia pendidikan. Desentralisasi akan menghilangkan sistem monopoli dan membuat suatu sistem lebih siap menerima inovasi (Eprilianto et al., 2020). Sebaliknya, "Sistem desentralisasi lebih efektif dalam melahirkan dan menyeleksi jenis-jenis peran dan organisasi ketimbang sistem sentralisasi (*decentralized have been types of roles and productions than centralized one*)" (Ben-David, 1984).

6. Dari kebiasaan diatur menuju kebiasaan motivasi diri

Pola perilaku yang cenderung menunggu perintah dan kebiasaan diatur akan berubah menjadi pola perilaku baru yang bercirikan motivasi diri. Misalnya seperti pada pembuatan program pengajaran bukan mengacu pada program yang kehilangan eksistensinya. Paradigma pendidikan yang baru berupaya melakukan *deregulasi* pendidikan (Muninggar et al., 2021). Dalam paradigma baru, pusat hanya memberikan rambu-rambu yang menjadi standar nasional, selebihnya diserahkan kepada daerah dan sekolah untuk menentukan hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan. Deregulasi pendidikan diyakini akan mampu menumbuhkan daya kreatifitas dan prakarsa sekolah, memberikan kelenturan kepada sekolah dalam mengelola sekolahnya, dan membuat sekolah sebagai pusat perubahan. Menurut Ichlasul Amal dikutip M. Sirozi (2003), bahwa institusi pendidikan harus berwenang penuh untuk mengelola sendiri manajemen pendidikan.

8. Dari mengontrol menuju mempengaruhi.

Manajemen sentralistik cenderung menekankan pada mengkomandoi dan mengontrol secara ketat sehingga pelaksana selalu diawasi melaksanakan pekerjaan pendidikan, sedangkan pendekatan

MBS lebih menekankan pada mempengaruhi. Karena itulah pendekatan MBS dijalankan meskipun belum tersistem. Fungsi kontrol biasanya diberlakukan secara kaku itu hanya menekankan pada bagaimana output dapat dicapai, dengan melupakan input dan proses yang menjadi output ini ada. mempengaruhi lebih cenderung menekankan pada bagaimana, berarti proses pendidikan yang menjadi titik perhatian dan titik peningkatan mutunya untuk mengangkat mutu pendidikan, artinya ke depan berorientasi kepada proses pencapaian output yang berkualitas, sebab adalah akibat dari suatu proses faktor lain kearah efektivitas kerja pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas (Sayyidi & Sidiq, 2020).

7. Dari overregulasi menuju deregulasi

Overregulasi pendidikan oleh pemerintah pusat telah membuat sekolah menjadi robot dan kualitas tertentu yang bermutu. Karakteristik input dapat direkrut berdasarkan aspirasi yang berkembang tanpa ada unsur rekayasa. Input itu kemudian diproses dalam formulasi sistem yang relevan oleh sebuah *teamwork* yang kompeten dan memahami karakteristik *Inputnya*. Orang yang mampu mempengaruhi orang lain itu, merupakan orang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Sutisna (1993) sebagai mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Soepardi (1988) yang dikutip oleh Nanang Fattah adalah bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian ke depan visi paradigma pendidikan memerlukan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan suatu contoh-contoh, bukan pemimpin yang hanya mampu mengontrol tetapi tanpa memberikan pengaruh (Patras et al., 2019).

9. Dari mengarahkan menuju memfasilitasi

Manajemen berbasis pusat lebih menekankan pada pemberian pengarahan, yang sering diwujudkan dengan kata-kata anda harus ke sana. Anda harus mengerjakan itu, dengan maksud agar pekerjaan cepat selesai. Sedangkan MBS lebih menekankan pada pimpinan yang memfasilitasi bawahannya agar bekerja secara kreatif. Misalnya bagaimana menurut pendapat anda untuk mengerjakan ini, bukan kerjakan ini, sesuai dengan petunjuk ini sedikit banyaknya perubahan paradigma dari mengarahkan menuju memfasilitasi, tergantung dengan kepemimpinan (Sari et al., 2020). Artinya perubahan paradigma dari mengarahkan menuju memfasilitasi maka penetapan program ditetapkan berdasarkan dari *botton up* bukan *top down*.

10. Dari menghindari resiko menuju mengelola resiko

Jika pola lama manajemen tradisional lebih menekankan pada menghindari resiko, maka pada pola manajemen baru lebih menganjurkan mengelola resiko. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa orang-orang yang berani mengambil resiko cenderung lebih maju dari pada orang-orang yang suka menghindari resiko. Resiko berarti berhadapan dengan masalah, Menurut James A. F. Stoner (1993), mengatakan bahwa latar belakang dan keahlian para manajer akan mempengaruhi apa yang mereka anggap sebagai resiko/masalah dan kesempatan. Menurut William Pounds ada empat situasi yang merupakan sumber masalah, yaitu (1) bila ada penyimpangan dari pengalaman yang lampau, (2) bila ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, (3) bila ada orang-orang yang menyajikan masalah kepada manajer, (4) bila para pesaing lebih berprestasi (Arfani, 2018). Dengan demikian, masalah/resiko harus dicarikan jalan pemecahannya dan dikelola sebab masalah bukan saja menimbulkan kerugian/resiko semata-mata, tetapi masalah itu dapat memberikan peluang untuk lebih berkualitas.

11. Dari menggunakan uang semuanya ke menggunakan uang seefisien mungkin

Kalau dalam pola anggaran lama lebih ditekankan pada uang harus dihabiskan semua, dalam MBS lebih ditekankan pada menggunakan uang secukupnya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi keuangan sekolah. Tentu saja, ini menuntut restrukturisasi anggaran pola lama. Penggunaan dana dalam paradigma MBS tidak harus habis pada setiap akhir periode anggaran, tetapi justru harus ada *saving*. Menurut Sirozi yang mengutip pendapatnya Joner (1985) tugas manajemen keuangan ada tiga fase, (1) *financial planning*, yaitu merupakan kegiatan yang mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. (2) *Implementation* yaitu pelaksanaan anggaran berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. (3) *Evaluating*, yaitu merupakan proses evaluasi tercapai sasaran anggaran.

12. Dari individu yang cerdas menuju *teamwork* yang kompak dan cerdas

Kecerdasan individu menjadi potensi sekolah yang perlu terus diberdayakan. Pada masa lalu, kecerdasan individu dianggap sebagai potensi individu yang bersangkutan, dan ditonjolkan kediriannya. Dalam MBS individu-individu yang cerdas itu harus diajak untuk memperhatikan kinerja sekolah secara keseluruhannya. MBS berasumsi bahwa *teamwork* yang kompak dan cerdaslah yang akan mampu meningkatkan mutu pendidikan/sekolah. Standar penilaian kinerja adalah hasil secara keseluruhan dan aktivitas komponen-komponen yang ada dalam sekolah (Achadah, 2019). Jadi tidak sekedar predikat kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi dan staf terbaik. Tetapi paradigma baru memakai standar nilai itu adalah sekolah yang berprestasi.

13. Dari informasi terpribadi menuju informasi terbagi

Informasi sering hanya dimiliki oleh sejumlah warga sekolah, khususnya kepala sekolah serta wakil-wakilnya, dan beberapa guru tertentu. Pada MBS informasi harus tersebar atau terbagi secara merata pada seluruh warga sekolah dan *stakeholder*. Informasi itu kemudian diterjemahkan bersama oleh warga sekolah dan diolah menjadi kebijakan yang efektif. Tentu saja, yang dimaksudkan di sini adalah bukan setiap ada informasi baru harus disampaikan pada seluruh warga sekolah dan *stakeholder*, tetapi informasi harus diberikan kepada yang menang berhak untuk menerimanya (Akbar & Noviani, 2019).

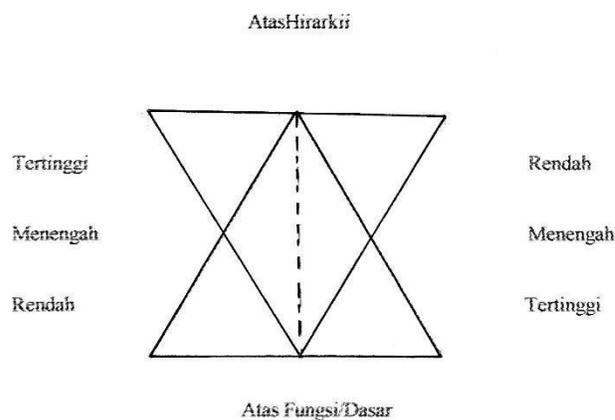
14. Dari pendelegasian menuju pemberdayaan

Manajemen pendidikan kita sampai saat ini masih diwarnai oleh praktek-praktek pendelegasian tugas dan fungsi serta tanggung jawab semata, tanpa diikuti penyerahan kewenangan, sehingga sekolah tidak berdaya. Maka terjadilah pemaksaan pola terhadap sistem yang tidak sesuai. Inilah yang dimuat pada majalah Gerbang majalah pendidikan mengutip apa yang dikatakan oleh Paulo Fraire sebagai pendidikan yang membelenggu. Pada paradigma MBS, sekolah harus diberdayakan melalui penyerahan tugas dan fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban, disertai kewenangan untuk mengambil keputusan. Pemberdayaan lawan dari tak berdaya, agar berdaya dengan memberikan peluang untuk berkreasi dan inovasi dalam hal apapun intinya untuk mutu pendidikan, bukan hanya menerima/pendelegasian saja, tetapi adanya peluang yang bebas untuk melakukan kreatifitas tanpa batas.

15. Dari organisasi hirarki menuju organisasi dasar

Pola organisasi hirarkis menunjukkan adanya tirani dalam pelaksanaan pendidikan. Organisasi sekolah di atur dengan berlapis-lapis manajemen yang rumit sehingga sekolah lambat beradaptasi, mengantisipasi perubahan-perubahan, dan kurang tanggap terhadap isu-isu kritis/strategis yang menyangkut kemajuan sekolah. Melalui paradigma MBS, organisasi sekolah

harus dibuat lebih dasar, dimana seluruh mitra kerja (bukan atasan dan bawahan) agar lebih responsif dan antisipatif, tidak saja terhadap isu-isu strategis/kritis yang dihadapi oleh sekolah, tetapi juga terhadap perubahan-perubahan secara umum. Menurut M. Sirozi (2004), paradigma baru itu dari struktur organisasi yang berbentuk kerucut, tetapi yang menentukan hanya bagian kerucutnya, berubah yang menentukan adalah bagian dasar dari kerucut itu, maka bagian kerucut yang kecil tidak lagi menentukan, melainkan bagian kerucut yang besarlah yang menentukan, artinya dalam menentukan mutu itu bukanlah dominan struktur yang tertinggi saja, tetapi menentukan mutu ditentukan oleh struktur yang paling bawah, jadi fungsi kerucut terbalik jadinya. Paradigma ini bila digambarkan sebagai berikut.



Gambar. Ilustrasi Struktur Organisasi Hirarkis Menuju Organisasi Fungsional Hirarkis

Paradigma baru dalam pendidikan pada dasarnya mengalami perubahan dari kekuasaan mengendalikan fungsi menuju fungsi mengendalikan kekuasaan. Pola kelembagaan tidak lagi bisa berjalan secara kaku, namun menjadi lebih asimetris dan fleksibel, hanya saja lebih memperkuat aspek kolaborasi diantara organisasi yang terlibat.

Tantangan Era Disrupsi 4.0

Disrupsi (disruption) istilah yang dipopulerkan oleh Clayton Christensen sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi, untuk bisa menang (for you to win, you’ve got to make somebody lose)”. Senada dengan pendapat tersebut, Kasali (2017) mengemukakan bahwa disruption adalah sebuah inovasi, yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption berpotensi Menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat (Salsabila et al., 2020). Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat Menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis.

Teori Disruptive innovation menjelaskan fenomena dimana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan (simplicity, convenience, accessibility, and affordability) di mana komplikasi (keruwetan) dan biaya tinggi di posisi Status quo (Rustandi, 2019). Awalnya, inovasi yang mengganggu terbentuk di (niche market) Pasar terbatas yang tampak tidak menarik atau tidak Penting (inconsequential) bagi industri yang sudah eksis (industry incumbents), namun akhirnya produk atau ide baru sepenuhnya meredefinisi industri. Era disrupsi merupakan bagian dari globalisasi, sebagai akibat dari digitalisasi dan evolusi teknologi (Fikri, 2019).

Penting untuk diingat bahwa Disruption adalah kekuatan positif (Lasmawan, 2019). Disruptive innovations bukanlah teknologi terobosan yang membuat produk menjadi lebih baik; melainkan inovasi yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau,

sehingga membuat mereka tersedia untuk populasi yang jauh lebih besar. Kita harus bisa segera beradaptasi, dan mengenali bagaimana keadaan sekarang yang penuh dengan perubahan. Tidak lagi sekedar berubah, melainkan langsung bergeser atau menggantikan yang sudah berdiri sebelumnya dalam waktu yang cepat. Pergeseran segmen konsumen yang sebelumnya generasi X kini menjadi generasi milenial memerlukan pengembangan dari berbagai aspek termasuk layanan. Jika kita mengikuti perkembangan selama ini yang terjadi, kita akan menyadari kalau tanda-tanda perubahan tersebut sudah terbaca sejak beberapa tahun lalu. Di era disrupsi kita harus mempunyai pilihan, membentuk ulang (reshape) atau menciptakan yang baru (create). Jika kita memutuskan untuk reshape, maka kita bisa melakukan inovasi dari produk atau layanan yang sudah dimiliki.

Hadirnya revolusi industri 4.0 perlu direspons secara kelembagaan melalui reconstruksi sistem pembelajaran yang inovatif, kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan dengan system kerja digital, misalnya, dengan information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT), dan big data analitic. Saat ini pandemi Covid-19 menjadi pendorong semakin dan pesatnya era disrupsi ini berkembang. Pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Berangkat dari kenyataan saat ini dunia tengah mengalami disrupsi teknologi, demikian halnya dengan perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk melakukan transformasi kelembagaan pendidikannya (Nugraha & Baidi, 2021). Upaya perbaikan kinerja manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapinya dan harus berpijak pada arah kebijakan yang jelas membawa susunan yang baik dan jelas. Arah kebijakan yang jelas akan membawa penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan maupun masing-masing. Dalam mengatur susunan organisasi dan kebutuhan jumlah kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing sesuai prinsip rightsizing (Rustandi, 2019).

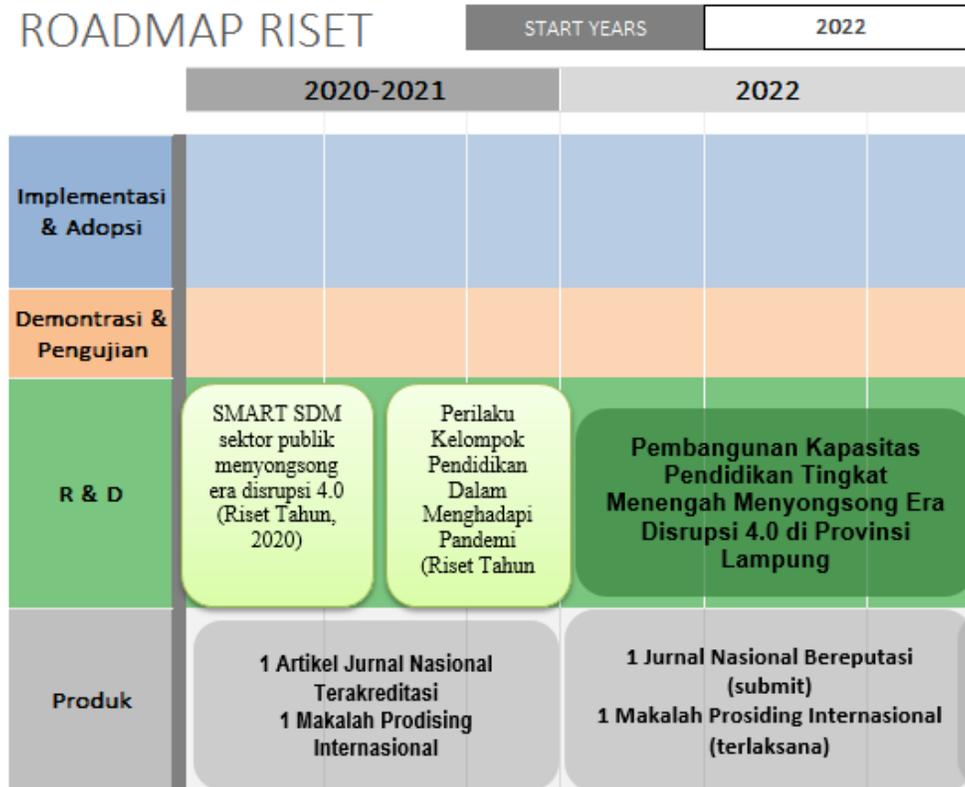
Penelitian Terdahulu

Pada riset sebelumnya diidentifikasi upaya pemerintah membangun Smart ASN yang merupakan langkah menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar pelayanan publik lebih efisien. Penelitian itu bertujuan untuk menelusuri secara kritis akar gagasan Smart ASN, menggali aspek yang masih menjadi kekurangan dalam Smart ASN (Faedlulloh et al., 2020). Pada riset lainnya yang terkait dengan disrupsi karena pandemi teridentifikasi ada pengelompokan dua dimensi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Dimensi pertama meliputi lingkungan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran online. Dimensi kedua meliputi faktor internal siswa dan sumber daya pendukung belajar. Faktor yang paling dominan mempengaruhi efektivitas pembelajaran adalah kondisi lingkungan, terutama lingkungan sosial dan fisik. Sementara itu, kurikulum tidak dianggap sebagai faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran (Sulistio & Hutagalung, 2021). Kedua penelitian ini menjadi dasar bagi riset ini guna melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan pembangunan sektor pendidikan di masa disrupsi 4.0, khususnya dalam aspek kelembagaan dan kebijakan.

Peta jalan (*road map*).

Berikut adalah roadmap tema riset ini.

ROADMAP RISET



Roadmap ini berupaya untuk mengkombinasi kajian tentang perkembangan era disrupsi dan upaya pemerintah di daerah guna melaksanakan pembangunan kapasitas pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya pada segmen kelompok pendidikan menengah pertama. Temuan yang ditargetkan adalah peta deskriptif, model dan beberapa produk ilmiah lainnya yang hendak diwujudkan.

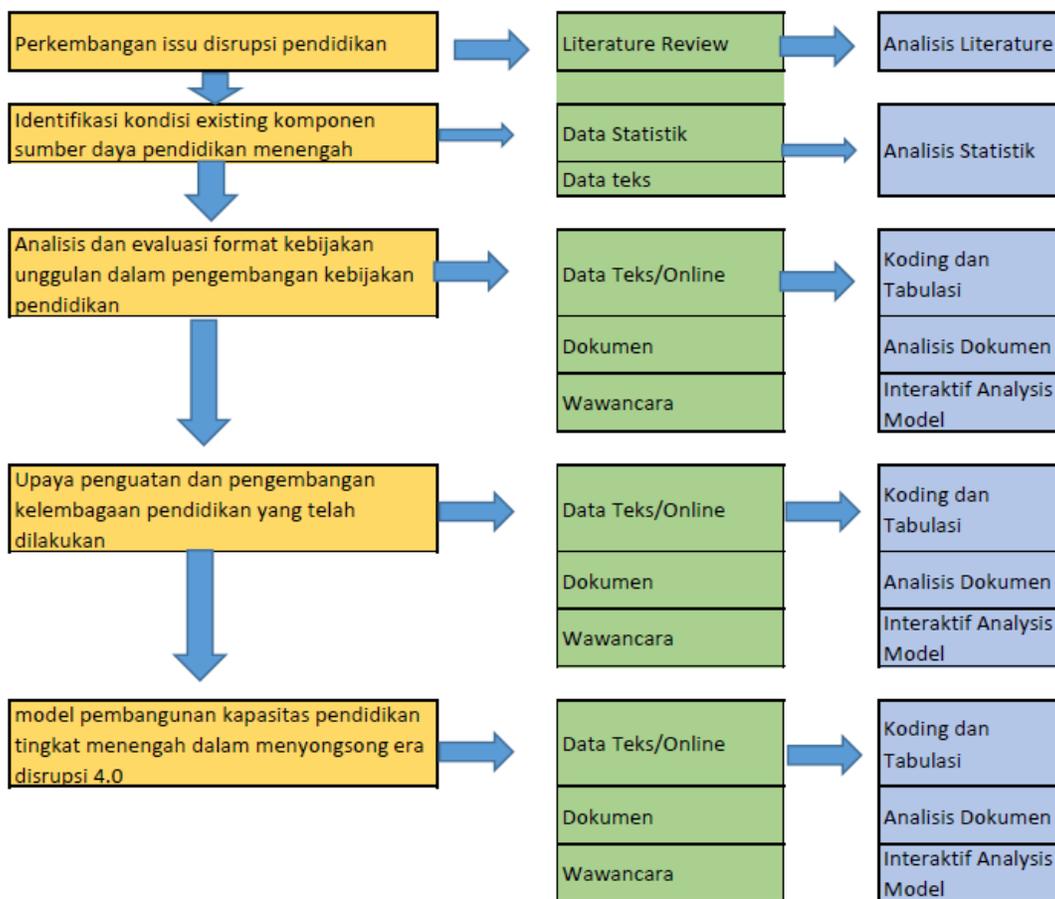
BAB III. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method yang mengkombinasi teknik kualitatif dan teknik kuantitatif dengan paradigma kualitatif. Data kuantitatif yang hendak digunakan mencakup data statistik pendidikan dari BPS dan instansi sejenis, sementara data kualitatif yang hendak digunakan meliputi wawancara, observasi dan analisis teks. Selanjutnya, data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun model. Fokus dalam riset ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan isu disrupsi pendidikan dalam kajian ilmiah di Indonesia hendak dianalisis secara sistematis melalui kajian terhadap berbagai dokumen publikasi dengan topik terkait;
- 2) Identifikasi kondisi existing komponen sumber daya pendidikan menengah pertama di provinsi Lampung hendak dianalisis secara mendalam dengan menganalisa distribusi sarana prasarana, guru, IPM dan sumber daya pendidikan lainnya;
- 3) Analisis dan evaluasi format kebijakan unggulan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung hendak dianalisis dengan mencermati kebijakan dan program unggulan bidang pendidikan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah,
- 4) Identifikasi dan analisis upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Lampung hendak dianalisis dengan mencermati ragam upaya kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder bidang pendidikan yang telah terlaksana,
- 5) Rumusan model pembangunan kapasitas pendidikan tingkat menengah dalam menyongsong era disrupsi 4.0 dapat dirancang dengan menganalisa strategi dan intervensi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi eksisting dan situasi kebijakan yang saat ini berlaku.

Hasil studi ini relevan bagi peneliti dan pembuat kebijakan pendidikan, dan dapat menjadi referensi bagi penyusunan program yang lebih efektif untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan

dan kelembagaan pendidikan. Analisis data sekunder dilakukan dengan melacak data yang relevan pada database BPS, sementara analisis literature dilakukan dengan cara menghimpun data teks publikasi ilmiah yang relevan, dan analisis program serta kelembagaan dilakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi kepada beberapa narasumber kunci pada topik penelitian tersebut. Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi multivariat, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent hendak diuji. Statistik inferensial termasuk uji-t dan analisis varians (ANOVA) juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara berbagai kategori. Sementara itu analisis kualitatif dilakukan dengan model interaktif yang dibantu tabel triangulasi.



Gambar. Bagan Alir Kegiatan Penelitian

Secara lebih detail, kegiatan penelitian dapat dirinci dalam tabel berikut:

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana	Indikator Capaian	Peran Mitra
1	Perencanaan dan Perijinan	- Pembagian tugas - Pengurusan ijin riset	Ketua Peneliti, Anggota Peneliti dan mahasiswa	- Rincian pembagian tugas - Surat ijin riset	Mendukung perijinan yang diajukan
2	Pengumpulan Data	- Survei - Wawancara - Dokumentasi	Ketua, Anggota Peneliti dan Mahasiswa	Terkumpulnya data survei, wawancara dan dokumentasi	Memfasilitasi pengumpulan data di lokasi
3	Analisis Data	- Profiling data existing - Analisis komponen dan desain model - Analisis sistem dan mekanisme	Ketua, Anggota Peneliti dan Mahasiswa	- Uraian kondisi kelompok sasaran survei - Wujud Desain model - Uraian sistem dan mekanisme	Memfasilitasi pengecekan data dan mengkonfirmasi data.
4	Penyusunan Laporan dan Luaran	- Penyusunan Laporan - Penyusunan Luaran	Keta, Anggota dan Mahasiswa	Tersusunnya laporan dan produk keluaran peneliti	Mengkordinasi penyelesaian riset di lokasi

Adapun pembagian tugas antara anggota penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. Distribusi Tugas Tim Peneliti

No	Posisi	Peran/ Tanggung Jawab
1	Ketua Peneliti	Mengkoordinasi pelaksanaan riset, kordinasi turun lapang dan analisis data
2	Anggota Peneliti	Mengkoordinasi perijinan, koordinasi enumerator dan penyusunan keluaran
3	Mahasiswa 1 & 2	Mendukung kegiatan administratif dan pelaporan
4	Mahasiswa 3 & 4	Mendukung kegiatan admnistratif dan analisis data
5	Mahasiswa 5 & 6	Mendukung kegiatan lapangan dan analisis data
6	Mahasiswa 7 & 8	Mendukung kegiatan lapangan dan analisis data
7	Mahasiswa 9 & 10	Mendukung kegiatan administratif dan pelaporan

Laporan untuk skema penelitian berbasis MBKM yang wajib disiapkan oleh peneliti ialah berupa:

1. Laporan Akhir Penelitian;
2. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan); dan

3. Luaran Ilmiah yang Wajib Dipublikasikan.

Luaran ilmiah yang wajib dipublikasikan pada penelitian berbasis MBKM ialah berupa:

1. artikel ilmiah yang dipresentasikan di konferensi internasional yang diselenggarakan LPPM;
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian/logbook yang setara dengan 16 kali tatap muka perkuliahan dan
3. Hasil uji TKT yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang menunjukkan hasil penelitian berada di level TKT 1-3.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan diartikan sebagai Metode atau strategi yang diterapkan dalam suatu proses belajar mengajar dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik dan menjadikan lebih aktif. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan sistem pendidikan yang terdiri dari pembelajaran, pengajaran, kurikulum, perkembangan peserta didik, cara belajar, alat belajar sarana dan prasarana dan kompetensi lulusan dari masa kemasa. Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, yang terjadi antara stimulus dan respon yang sesuai dengan prinsip mekanistik.

Perkembangan pendidikan di dunia tidak lepas dari adanya perkembangan dari revolusi industri yang terjadi di dunia, karena secara tidak langsung perubahan tatanan ekonomi turut merubah tatanan pendidikan di suatu negara. Revolusi industri dimulai dari 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui *penemuan mesin uap*, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui *penggunaan listrik* yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan *komputerisasi*, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa *intelegensia dan internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Perubahan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat, kita bisa melihat saat ini di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya di hampir lini

kehidupan manusia. Pada era ini hampir seluruh model bisnis mengalami perubahan besar, dari hulu sampai hilir.

Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 ? Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Tersusunnya *Making Indonesia 4.0* memiliki visi yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang masuk dalam 10 besar yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 kedepan. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu bagian dari 10 prioritas dalam melaksanakan program *making indonesia 4.0*. SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan *Making Indonesia 4.0*. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Indonesia merencanakan akan bekerja sama dengan para pelaku industri dan pemerintah luar negeri untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan, juga meningkatkan mobilitas tenaga kerja yang dimanfaatkan dalam menyediakan SDM.

Untuk mencapai ketrampilan abad 21, trend pembelajaran dan *best practices* juga harus disesuaikan, salah satunya adalah melalui pembelajaran terpadu atau secara *blended learning*. *Blended learning* adalah cara mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing siswa dalam kelas. "*Blended learning* memungkinkan terjadinya refleksi terhadap pembelajaran"

Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak negatif dari Industri 4.0 seperti *disruptive technology*. Kemunculan *disruptive technology* ini akan membuat perubahan besar dan secara perlahan dan bertahap akan mematikan bisnisdan pasar tradisional.. Selain itu Industri 4.0 juga berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Di kawasan ASEAN, hanya Singapura yang telah siap menghadapi era industri baru ini. Oleh karena itu dalam pembahasan ini kita akan menganalisis pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.

Dalam arti yang sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lebih jauh dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan adalah: a) usaha (kegiatan) usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, b) ada pendidik, pembimbing atau penolong, c) ada yang didik atau si terdidik, d) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, e) dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. Sementara dalam Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan biasa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-

program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era-globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan public dibidang pendidikan. Maka kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan. Sedangkan kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, perlu pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan kebijakan, yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.

Masalah mendasar dunia pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan, dengan masih tingginya ketimpangan mutu pendidikan antar daerah. Indikator

pembangunan pendidikan pada tingkat provinsi menunjukkan dua kecenderungan, yakni ada dalam kategori di atas standar nasional dan ada di bawah standar nasional. Indikator mutu pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi, angka putus sekolah, angka mengulang kelas, rasio guru-murid, guru-sekolah, tingkat kelayakan guru, dan kondisi sarana prasarana sekolah.

Ketimpangan mutu pendidikan ini bersifat multidimensional. Berdasarkan fenomena yang terus berkembang saat ini, minimal ada tiga sebab pokok, yakni: *Pertama*, pendidikan mengalami proses pereduksian makna, bahkan terdegradasinya kegiatan menghafal dan keterampilan mengerjakan soal ujian (UN). *Kedua*, pendidikan terjerumus ke dalam proses komersialisasi, di mana pendidikan telah berubah menjadi komoditi yang diperjual-belikan atau diperdagangkan dan dikelola, seperti dunia industri yang cenderung berorientasi pada keuntungan (*profitoriented*). *Ketiga*, pendidikan hanya melahirkan superiorisasi sekolah, yakni sekolahmenjadi semakin digdaya, berjarak, dan menekan orang tua siswa, baik secara halus, maupun terang-terangan.

Revolusi industri terdiri dari dua (2) kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Sehingga jika dua kata tersebut dipadukan bermakna suatu perubahan dalam proses produksi yang berlangsung cepat. Perubahan cepat ini tidak hanya bertujuan memperbanyak barang yang diproduksi (kuantitas), namun juga meningkatkan mutu hasil produksi (kualitas).

Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini pun sedang berjalan dari masa ke masa. Dekade terakhir ini sudah dapat disebut memasuki fase keempat 4.0. Perubahan fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Fase pertama (1.0) bertempuh pada penemuan mesin

yang menitikberatkan (*stressing*) pada mekanisasi produksi. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada etape produksi massal yang terintegrasi dengan *quality control* dan standarisasi. Fase ketiga (3.0) memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase keempat (4.0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur. Buah dari revolusi industri 4.0 adalah munculnya fenomena *disruptiveinnovation*. Dampak dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang kehidupan. Mulai industri, ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Fenomena ini juga telah berhasil menggeser gaya hidup (*life style*) dan pola pikir (*mindset*) masyarakat dunia. *Disruptive innovation* secara sederhana dapat dimaknai sebagai fenomena terganggunya para pelaku industri lama (*incumbent*) oleh para pelaku industri baru akibat kemudahan teknologi informasi.

Satu di antara sekian banyak contoh di sekitar kita adalah menurunnya pendapatan tukang ojek dan perusahaan taksi. Penurunan pendapatan ini bukan diakibatkan oleh penurunan jumlah pengguna ojek dan taksi, melainkan terjadinya perubahan perilaku konsumen. Berkat kemajuan teknologi informasi, muncul perusahaan angkutan baru seperti GO-JEK, GRAB, dan UBER yang pelayanannya berbasis android. Konsumen hanya perlu menginstal aplikasi di *smartphone*-nya untuk menggunakan jasa mereka. Selain itu, tarif yang dipasang pun jauh lebih murah. Ketiga pemain baru inilah yang menyebabkan para *incumbent* jasa angkutan mengalami kerugian. Selain itu, fenomena *disruptive innovation* juga menyebabkan beberapa profesi hilang karena digantikan oleh mesin. Misalnya, kini semua pekerjaan petugas konter check-in di berbagai bandara internasional sudah diambil alih oleh mesin yang bisa langsung menjawab kebutuhan penumpang, termasuk mesin pindai untuk memeriksa paspor dan visa, serta *printer* untuk mencetak *boarding pass* dan *luggage tag*. Dampak lainnya adalah bermunculannya profesi-profesi baru

yang sebelumnya tidak ada, seperti *Youtuber, Website Developer, Blogger, Game Developer* dan sebagainya.

Adapun keuntungan dari munculnya *disruptive innovation* memberikan antara lain: *Pertama*, dimudahkannya konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Dengan memotong biaya yang dikeluarkan, perusahaan yang menggunakan teknologi terbaru mampu menekan biaya sehingga dapat menetapkan harga jauh lebih rendah daripada perusahaan incumbent. Dengan demikian, semakin murah biaya yang dikeluarkan konsumen semakin membuat konsumen sejahtera.

Kedua, teknologi yang memudahkan. Munculnya inovasi yang baru tentu akan membawa teknologi yang baru dan canggih, setidaknya dibandingkan dengan teknologi yang telah lama ada. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi transfer teknologi menuju yang lebih modern. *Ketiga*, memacu persaingan berbasis inovasi. Indonesia merupakan negara yang tidak dapat begitu saja makmur tanpa adanya inovasi. Dengan adanya inovasi yang mengganggu, maka perusahaan dalam industri dipaksa untuk melakukan inovasi sehingga terus memperbaiki layanannya.

Keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Inovasi yang dilakukan akan memberikan kesempatan lapangan kerja yang baru. Jika tidak membuka lapangan baru, setidaknya dapat memperluas lapangan kerja yang sudah ada. Terlebih dengan inovasi dapat memberikan kesempatan kerja baru dengan upah yang lebih baik dibanding dari lapangan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. *Kelima*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang mengganggu sesuai dengan teori Schumpeter akan meningkatkan produktivitas akibat efisiensi. Dengan adanya kedua hal tersebut maka akan menambah kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Di lain sisi, inovasi juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat setelah sebelumnya pendapatannya meningkat. Perkembangan yang menjadi titik akhir adalah meningkatnya jumlah Produk Domestik

Bruto. Jika setiap inovasi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan relatif bertahan setiap tahunnya, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

1. Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 atau biasa disebut era disrupsi yang terjadi saat ini tidak lepas dari adanya produk inovasi. Oleh karena itu dalam buku yang berjudul *Disruption* mengatakan bahwa Disrupsi diartikan sama dengan “inovasi” atau ancaman bagi *incumbent*. Incumbent dalam konteks ini bisa berarti gejala yang selama ini telah ada. Mengapa disebut sebagai ancaman? Karena biasanya incumbent tidak siap dengan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas kreatif yang dapat menghasilkan ide, gagasan, kegiatan, objek atau benda yang baru sehingga bermanfaat bagi manusia. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi adalah Usaha positif, kreatif untuk menghasilkan hal yang baru dan berguna bagi kehidupan.

Ciri-ciri Era Revolusi industri 4.0 adalah pertama *robot automation* yaitu artinya proses produksi tidak lagi mengandalkan massa (jumlah manusia) namun digantikan dengan sistem robot. Hal ini dikarenakan dengan sistem robot dapat lebih bekerja efektif dan efisien dibandingkan jika dilakukan oleh manusia. Ciri ke dua adalah 3D printer yang memungkinkan mencetak tidak lagi hanya untuk objek 2D namun sekarang rumah pun sudah dapat dicetak menggunakan mesin 3D printer. Ciri ke tiga adalah internet of things yaitu kecepatan yang dikendalikan oleh internet. Saat ini semua pekerjaan hampir semua terhubung dengan koneksi internet. Ciri ke empat adalah big data. Pernahkah kita disodori oleh iklan mengenai barang-barang kesukaan kita? Bagaimana sistem itu tahu karena terdapat sebuah data yang mengkoleksi informasi kita.

Gejala gejala transformasi industri 4.0 yang dapat muncul saat ini dapat dilihat seperti sektor retail sudah diganti dengan *e-commerce*, transportasi sekarang muncul adanya transportasi online, pekerja pabrik sudah diganti dengan teknologi robot, surat sudah diganti dengan message service seperti whatsapp, surat elektronik atau email, rumah produksi sekarang diganti dengan munculnya pembuat konten elektronik diyoutube. Nah di bidang pendidikan sendiri kita sudah banyak melihat dimana sumber atau konten belajar bidang apapun sudah dapat dengan mudah diakses, gratis melalui koneksi internet kapanpun dan dimanapun. Di bidang pendidikan saat ini sudah ada beberapa *startup* yang melihat peluang ini contohnya : *ruangguru.com*, *quiper.com* dan di luar indonesia ada khan academy, byjus dan masih banyak lagi.

Beberapa tahun kedepan sistem pembelajaran ini akan menggantikan model bimbel bimbel konvensional. Mengapa *startup startup* bidang pendidikan ini kini menjadi favorite? Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi disekolah dan juga apa yang mereka tawarkan oleh penyedia layanan itu yaitu kemudahan akses (bisa diakses kapan saja dan dimana saja), flexibel (bisa menyesuaikan dengan materi), dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Jadi disini kita bisa melihat adanya pergeseran model pembelajaran yang diinginkan oleh pengguna (siswa). Disini berarti tantangan bagi para pengajar di era revolusi industri 4.0 untuk dapat merubah strategi dan model belajar yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dan teknologi. Dari uraian di atas kita melihat bahwa teknologi bertransformasi demikian pula dengan dunia pendidikan. Perubahan ini mengakibatkan banyak perubahan dan pergeseran peran, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya keguruan.

Berbicara tentang perkembangan teknologi itu seperti melihat dua belah mata pisau dimana satu sisi memberikan sisi positif dan sisi yang lain dapat juga memberikan dampak negatif. Oleh karena

itu kita harus mampu menyikapi secara bijak perkembangan teknologi khususnya di era Revolusi 4.0 di bidang pendidikan ini. Segala perubahan ini harusnya dapat menjadi pendorong bagi dunia pendidikan untuk melahirkan kreativitas, sehingga dapat menciptakan proses pendidikan yang menghasilkan (calon) guru yang berkualitas, profesional dan berkarakter.

Sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada tiga literasi utama yaitu 1) literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia. Tiga keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital (Big Data), literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Literasi baru yang diberikan diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif dengan menyempurnakan gerakan literasi lama yang hanya fokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Adaptasi gerakan literasi baru dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon terhadap era industri 4.0.

Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

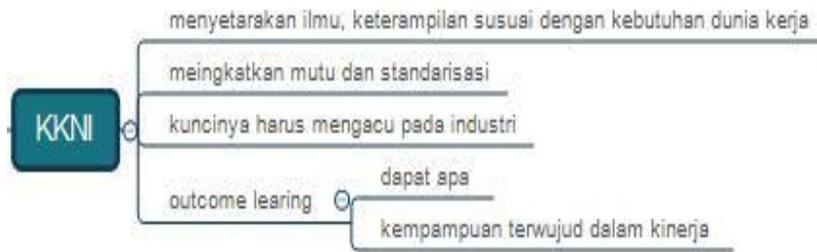
Berbicara tentang tantangan menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini pasti banyak antara lain adalah Pemerataan pembangunan. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menekan kesenjangan pembangunan di Indonesia namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan pemerataan pembangunan di Indonesia masih terjadi. Salah satu ciri suatu daerah sudah tersentuh

pembangunan biasanya ditandai bahwa daerah tersebut sudah dialiri oleh listrik. Namun masih banyak desa yang belum tersentuh listrik.

Hal ini tentu berimplikasi pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Listrik merupakan sebuah simbol dari kemajuan, sehingga bisa disebut daerah tersebut tertinggal karena belum dialiri oleh listrik. Dari data ini saja menunjukkan bahwa tidak semua daerah siap akan segala perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 ini. Konektivitas jaringan internet juga merupakan salah satu syarat jika kita ingin mengimplementasikan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet, terutama sekolah-sekolah. Tantangan lain dalam penerapan kurikulum di Indonesia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan kualitas SDM termasuk dalam 10 point program Making Indonesia 4.0 yang di cangkakan oleh pemerintah. Salah satu programnya adalah menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Mengapa perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri? Dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Untuk menjawab itu sebelumnya kita akan bahas dulu tentang salah satu penerapan kurikulum KKNI.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Dari penjabaran di atas kami sangat setuju dalam proses dan

kerangka KKNi ini. Namun dalam prosesnya masih banyak terdapat kendala-kendala. Jika dijabarkan tujuan KKNi adalah sebagai berikut :

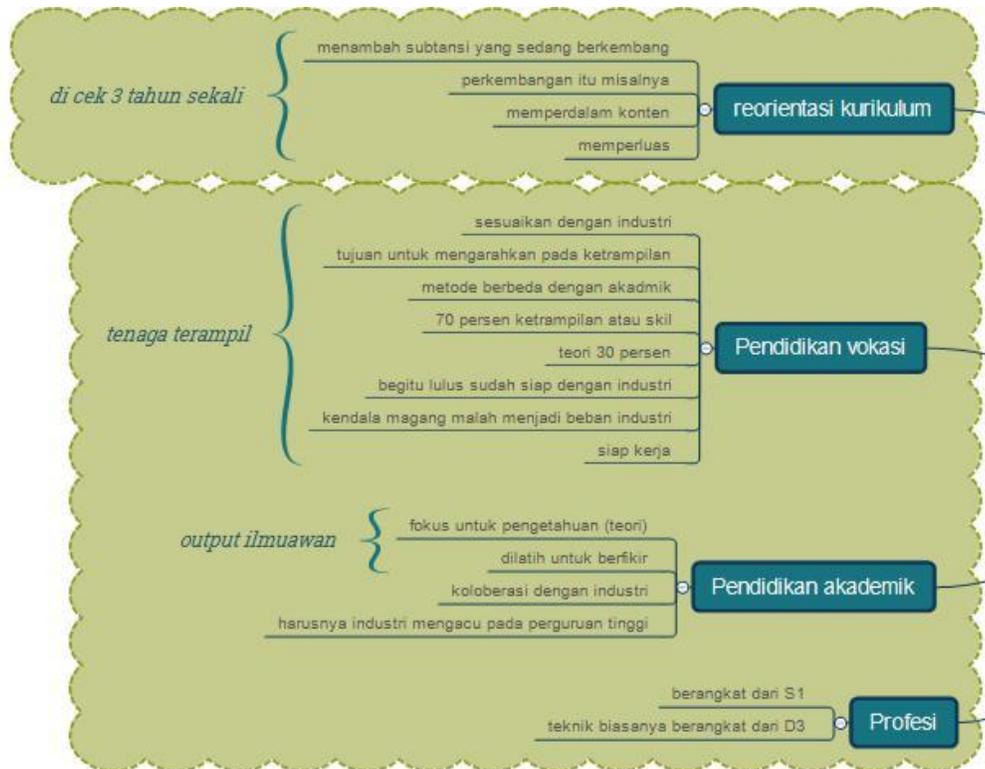


Gambar 1 Kurikulum KKNi

Dari gambar diatas apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Pada penerapannya kami melihat penerapan KKNi di Indonesia belum dapat sepenuhnya dijalankan. Masih terdapat Gap yang jauh antara point pertama yaitu menyetarakan ilmu, keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan semakin cepat perkembangan dunia khususnya teknologi saya melihat semakin jauhnya Gap antara perguruan tinggi dengan dunia kerja khususnya di Indonesia. Tingginya pengangguran di Indonesia dan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ditekuni sekarang dengan background keilmuan yang dimiliki saat ini menunjukkan apa yang dicita-citakan dalam KKNi ini belum dapat tercapai. Kami melihat ada yang salah dalam sistem pendidikan saat ini. Dimana seakan antara perguruan tinggi dan industri seakan berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan secara penuh memperhatikan hal ini. Karena industri tidak bisa lepas dari perguruan tinggi yang memang mengeluarkan ilmuwan-ilmuan dibidang masing-masing. Kami tidak melihat itu ada di Negara Kita. Seharusnya perguruan tinggi dan industri harus ada sinkronisasi dari pemerintah. Agar tidak menimbulkan lulusan perguruan tinggi menganggur atau bekerja yang diluar bidang keilmuannya. Sehingga saat dia bekerja tidak bisa maksimal sesuai dengan kualitas dan keilmuan yang mereka miliki. Mereka tidak mampu mengembangkan

keilmuan mereka setelah lulus. Sehingga di Indonesia saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Sehingga dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh agar apa yang menjadi tujuan KKNi ini terwujud. Di bawah ini merupakan ringkasan apa yang seharusnya diterapkan dalam KKNi.



Gambar 2 orientasi kurikulum KKNi

Dari pembahasan di atas, menunjukkan tujuan dari KKNi saat ini belum terlalu tercapai. Mudah-mudahan kedepan akan lebih baik sehingga apa yang menjadi cita-cita mulai dari pendidikan di Indonesia ini dapat terpenuhi khususnya dalam menghadapi era revolusi 4.0.

Solusi dalam Menyongsong Pendidikan Indonesia era 4.0

Demi menyongsong Pendidikan di era 4.0, maka mau tidak mau semua permasalahan laten di atas harus mampu dicarikan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, sebagaimana diutarakan di atas, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan. Menurut Rhenald Kasali, ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan di era 4.0 ini, yaitu *disruptive mindset*, *self-driving*, dan *reshape or create*.

Disruptive mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh *setting* yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Dalam bidang pendidikan hari ini tengah berada di zaman digital yang serba cepat, mobilitas tinggi, akses informasi menjadi kebutuhan primer setiap orang. Selain itu, masyarakat hari ini menuntut kesegeraan dan *real-time*. Segala sesuatu yang dibutuhkan harus dengan segera tersedia. Bila akses terhadap kebutuhan itu memakan waktu terlalu lama, maka masyarakat akan meninggalkannya dan beralih ke pelayanan yang lain. Intinya, tuntutan di era disrupsi ini adalah respons.

Kecepatan respons akan sangat berpengaruh terhadap *user*. Inilah yang dinamakan Rhenald Kasali sebagai *corporate mindset* (*mindset* korporat). *Mindset* ini perlu dibangun oleh para pelaku di bidang pendidikan. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada *user* tidak lagi birokratis. Lebih lanjut Rhenald mengatakan, ciri-ciri orang yang ber-*mindset* korporat adalah; *pertama*, tidak terikat waktu dan tempat. Ia bekerja tidak terbatas pada jam dan ruang kerja. Orang seperti ini telah menyadari bahwa waktu dan tempat tidak lagi menjadi penghalang dalam bekerja. Teknologi telah mematikannya. Manusia hari ini bisa terhubung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa terikat waktu dan tempat. Jika *mindset* tersebut diterapkan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, maka akan terbentuk sistem manajerial yang efektif dan efisien. Selanjutnya, apabila ditarik dalam

konteks pembelajaran, guru akan lebih leluasa dan fleksibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Kedua*, memberikan pelayanan yang proaktif. Kegiatan pembelajaran yang masih terkonsentrasi pada transfer pengetahuan dari guru dan terkurung di dalam kelas, akan sulit menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Paradigma pendidikan telah berubah, bukan lagi *teacher centered*, tapi *student centered*. Guru dituntut untuk lebih proaktif memberikan fasilitas, bimbingan, dan dampingan kepada peserta didik.

Ketiga, tidak terpaku pada anggaran biaya. Berbeda dengan mental birokrat yang serba terikat dengan biaya (tidak kerja jika tidak ada anggaran). Orang yang ber-*mindset* korporat tidak berhenti berinovasi karena kendala uang. *Keempat*, memaksimalkan fungsi media sosial. Pengelola pendidikan hari ini harus mampu memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang tersedia. Media sosial bukan lagi hiburan semata. Ia telah menjelma menjadi alat komunikasi yang efektif, alat bantu kerja, dan inspirasi dalam berinovasi. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik.

Kelima, berpikir solutif jika dihadapkan pada masalah. Bukan sibuk memikirkan alasan untuk menyelematkan diri. *Keenam*, tidak alergi terhadap perubahan. Justru di era sekarang, perubahan telah menjadi kebutuhan. Suatu lembaga jika tetap bertahan/statis dalam pengelolaannya, akan kalah dengan lembaga yang pengelolaannya lebih dinamis. Dan *ketujuh*, berpikir dan bertindak strategik. Langkah dalam pengelolaan lembaga pendidikan harus memiliki *roadmap* yang jelas. Sasaran yang dicanangkan harus realistis.

Self-Driving. Organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi mengarungi samudra *disruption* adalah organisasi yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) bermental pengemudi yang baik (*good drivers*) bukan penumpang (*passanger*). SDM yang bermental *good driver* akan

mau membuka diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, tangkas dalam bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan mampu bekerja efektif, inovatif, dan efisien. Kemampuan-kemampuan tersebut terutama dibutuhkan oleh para pemimpin dan pengelola lembaga pendidikan. Mereka dituntut untuk dapat menjadi pengemudi yang handal bagi lembaganya. Oleh karenanya, kompetensi manajerial saja tidaklah cukup. Melainkan harus pula diringi dengan kemampuan memimpin. Sementara SDM yang bermental penumpang akan cenderung birokratis, kaku, lambat, dan kurang disiplin.

Reshape or Create. Ada genealogi pemikiran yang populer di kalangan umat Islam yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Genealogi tersebut adalah “mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”. Sebagaimana banyak disinggung di atas, bahwa era 4.0 merupakan era dimana kecepatan dan kemudahan menjadi tuntutan manusia. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian masif. Maka ada dua pilihan logis bagi pendidikan untuk menghadapi era ini, yaitu *reshape* atau *create*

Reshape dalam genealogi di atas berarti mempertahankan yang lama yang baik. Akan tetapi, di era 4.0 mempertahankan saja tidak cukup, harus dipertajam. Cara-cara dan sistem lama yang masih baik dan relevan perlu untuk dimodifikasi sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Misalnya pada tataran manajemen dan profesionalitas SDM, maka perlu diperkuat dan ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Bisa melalui diklat pelatihan, seminar, loka karya, beasiswa studi, dan sebagainya. Alternatif lainnya adalah *create*, menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau dalam genealogi di atas “mengambil yang baru yang lebih baik”. Hal ini berarti, cara dan sistem yang lama telah usang (*obsolete*). Sehingga tidak mungkin dipakai lagi. Jalan keluar satu-satunya adalah membuat cara dan sistem yang sama sekali baru. Misalnya mengembangkan

sistem pelayanan baru berbasis digital. Sehingga warga lembaga pendidikan dapat dengan leluasa mengakses segala keperluan terkait pendidikan dan layanan administrasi. Contoh lainnya, mengembangkan model pembelajaran kekinian dengan sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, seperti *E-learning*, *Blended Learning*, dan sebagainya.

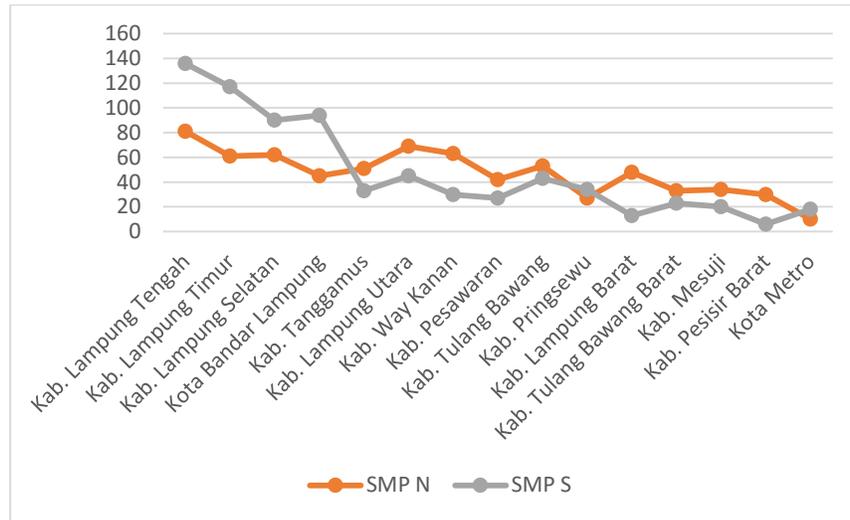
Kondisi Existing Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung

Distribusi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Pada Tingkat Menengah Pertama

Sekolah di Indonesia dijalankan oleh pemerintah atau swasta. Beberapa sekolah swasta bahkan menyebut diri mereka sebagai ‘sekolah nasional plus,’ yang berarti bahwa kurikulum mereka melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, seperti penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau dengan memiliki kurikulum berbasis internasional daripada yang nasional.

Menurut data Bank Dunia, ada lebih dari 250.000 sekolah di nusantara, tetapi sekolah swasta memang memainkan peran penting. Sementara hanya 7 persen sekolah dasar swasta, angka tersebut meningkat menjadi 56 persen di tingkat sekolah menengah pertama dan 67 persen di tingkat menengah atas. Undang-Undang Pendidikan Nasional (No.20 / 2003) dan UUD Amandemen III menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan. Pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan sebagai akibatnya, pemerintah diberi mandat mengalokasikan 20 persen dari pengeluarannya untuk pendidikan. Negara ini juga baru-baru ini menerapkan program Kartu Indonesia Pintar, yang memungkinkan siswa miskin untuk belajar di sekolah umum gratis hingga sekolah menengah. Hal ini membuat kualitas pendidikan publik di Indonesia sangat terpuruk. Dengan kata lain, meskipun sekolah negeri di DKI Jakarta mungkin memiliki kualitas yang baik, hal yang sama tidak berlaku

untuk sekolah di pedesaan Sulawesi. Pada sisi lain, keberadaan sekolah swasta ini dapat mendukung pemenuhan pendidikan pada daerah yang belum dimasuki oleh sekolah negeri. Hal ini nampak dalam sebaran data distribusi sekolah menengah pertama di Provinsi Lampung berikut ini:



Gambar. Distribusi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung

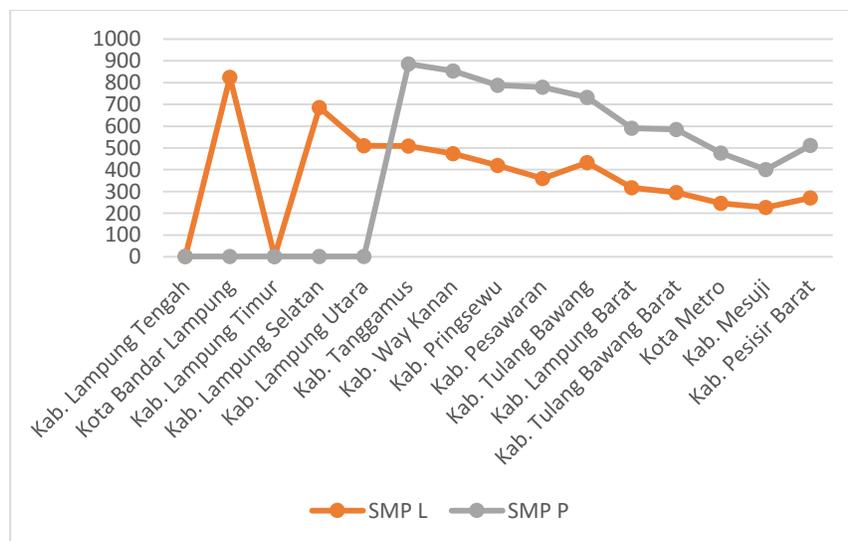
Sumber: Neraca Pendidikan Kemdikbud, 2020

Dari gambar diatas, nampak keberadaan sekolah swasta dominan di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Hal ini mengindikasikan jika daerah tersebut memiliki daya tarik bagi sekolah swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, peran sosial dari beberapa sekolah swasta yang berafiliasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan juga mencerminkan upaya untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan pendidikan di daerahnya. Hal yang berbeda terjadi pada beberapa daerah dengan dominasi peran sekolah negeri, dimana daya tarik bagi swasta untuk masuk dan berkembang masih dibatasi oleh kendala seperti infrastruktur dan lainnya.

Distribusi Guru Berdasarkan Gender

Rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Namun implikasi yang bisa dirasakan adalah minimnya perempuan yang bisa berkiprah di sector public

dibandingkan dengan laki-laki karena kurangnya kemampuan yang dimiliki. Persoalan rendahnya tingkat pendidikan juga bermuara pada persoalan selanjutnya yang menyangkut kehidupan perempuan. Perempuan, dalam konsep peran jenis kelamin secara kodrat, struktur anatomi memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi reproduksi yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan teori rekonstruksi sosial, fungsi reproduksi ini diperluas ke tugas-tugas domestic di dalam rumah tangga, seperti membesarkan anak, mencuci dan memasak. Konstruksi sosial ini telah menimbulkan gejala diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka kurang berdaya dalam domain public. Akibatnya, perempuan menjadi segmen masyarakat yang secara ekonomis kurang produktif. Lebih jauh akan mengakibatkan kualitas hidup relative perempuan menjadi lebih rendah yang selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya kualitas anak dan masa depan masyarakat (Ace Suryadi, 2004:11). Dalam sektor pendidikan, daya tarik sektor ini nampaknya lebih menuju kepada kelompok perempuan, dimana sebagai besar guru justru berasal dari kelompok gender perempuan. Hal ini juga terjadi pada distribusi guru sekolah menengah pertama di Provinsi Lampung, yang dapat dicermati dari gambar dibawah ini:



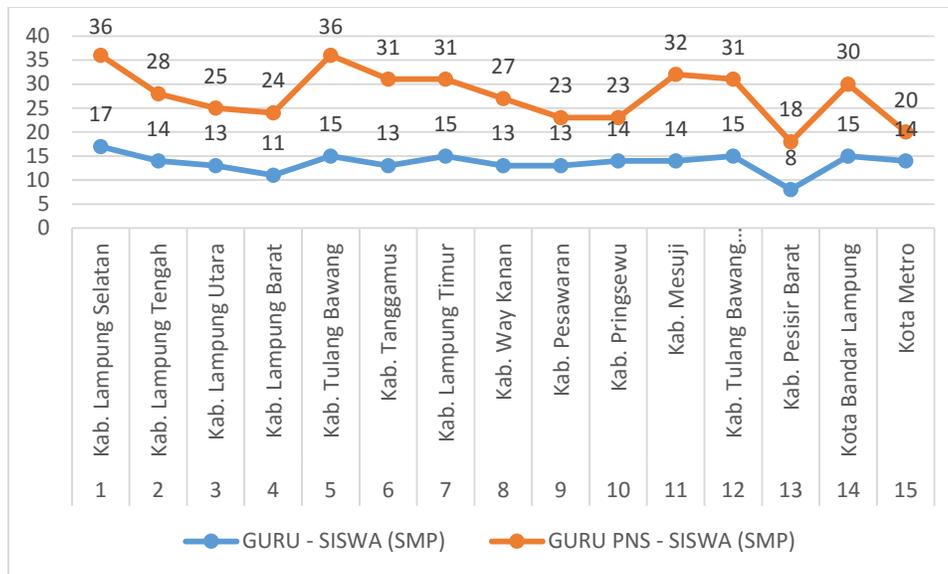
Gambar. Distribusi Guru Berdasarkan Gender Pada Sekolah Menengah di Provinsi Lampung

Sumber: Neraca Pendidikan Kemdikbud, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dicermati dominasi guru perempuan pada hampir semua daerah di Provinsi Lampung. Hanya ada beberapa daerah dengan komposisi guru laki-laki yang dominan, diantaranya Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Utara. Hal ini menunjukkan jika orientasi menjadi guru nampak lebih dimiliki oleh kelompok perempuan.

Rasio Guru dan Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama

Rasio perbandingan antara jumlah murid dengan guru untuk menakar kualitas mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya terbilang cukup. Hanya saja, yang menjadi masalah yakni terkait kualitas dan sebaran tenaga pendidik yang tidak merata di setiap daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, di setiap sekolah dasar (SD), sekolah setidaknyanya harus menyiapkan 1 guru untuk setiap 32 siswa. Padahal, jika melihat data dari World Bank dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 11 tahun terakhir, antara tahun 2010-2020, perbandingan jumlah murid dan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Yakni dengan rata-rata di angka 15-20 murid setiap 1 gurunya. Meski terjadi adanya peningkatan, jumlah perbandingan antara murid dengan guru terbilang cukup. Hanya saja, diperkirakan sebaran tersebut tidak merata di setiap daerah. Di mana data rasio tersebut tidak terdata hingga tingkat kabupaten atau bahkan lingkup lebih kecil. Pada konteks Provinsi Lampung, distribusi tersebut dapat terlihat secara komparatif antara ketersediaan guru tetap (PNS) dan guru dalam kategori lain. Secara detail data tersebut dapat dicermati dari gambar dibawah ini:



Gambar. Rasio Guru dan Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Lampung

Sumber: Neraca Pendidikan Kemdikbud, 2020

Distribusi dan kualitas guru yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Ketimpangan guru, baik dari sisi distribusi ataupun kualitas, akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia. Jumlah guru di Indonesia pada dasarnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Namun, peningkatan jumlah guru pada periode tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa. Hal ini tercermin pada rasio guru-siswa yang relatif kecil. Rasio guru-siswa merupakan salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Rasio guru-siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien, sebab satu guru mengajar sedikit siswa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio guru-siswa yang ideal bagi Indonesia adalah 1:29 untuk jenjang pendidikan SD, 1:24 untuk SMP, dan 1:20 untuk SMA.

Rasio guru-siswa ini tergolong relatif kecil, sehingga pemanfaatan guru menjadi tidak efisien. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan makro di suatu daerah yang kurang tepat. Kebijakan makro ini adalah membangun sarana pendidikan (sekolah) tanpa mempertimbangkan potensi siswa dan prediksi ke depan. Prediksi ini khususnya berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk yang cenderung semakin terkendali, sehingga jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan semakin berkurang. Selain itu, rasio guru-siswa yang relatif kecil juga disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata antar wilayah di Indonesia.

Kondisi sarana prasaran pendidikan menengah pertama

Di dalam sistem pendidikan, terdapat banyak sekali komponen yang mempengaruhi berjalannya suatu system tersebut, baik dari input yang dikelola, tujuan, prosesnya, feedback yang didapat, mekanisme pengendalian yang dilakukan maupun output yang merupakan hasil dari proses pendidikan yang di berlangsungkan. Disini siswa atau peserta didik merupakan input yang harus didik melalui suatu proses pembelajaran dan harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, dalam berlangsungnya proses tersebut banyak sekali penunjang yang akan ikut berperan, baik dari pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, motivasi belajar dari lingkungan luar maupun sarana dan prasarana suatu satuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan tentu saja dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan, namun di kehidupan sekarang pemerataan sarana prasarana masih sangat kurang, tak hanya pemerataan, terkadang standarisasi pun kurang diperhatikan. Pada konteks penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, sarana prasaran akan terkait dengan ketersediaan beberapa jenis ruang dengan peruntukan khusus di sekolah. Semakin tersedia ruang tersebut maka akan semakin baik pengelolaan pendidikan pada sekolah bersangkutan. Adapun sebaran kondisi ketersediaan sarana prasarana tersebut pada tingkat sekolah menengah pertama di Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. Distribusi Sarana Prasarana Pada Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Lampung (Tahun 2020)

No	Wilayah	Jumlah Sekolah	R. Kelas	R. Perpustakaan	R. Laboratorium	R. Praktik
1	Kab. Lampung Barat	494	2808	268	169	3
2	Kab. Lampung Selatan	1.495	8037	617	478	9
3	Kab. Lampung Tengah	1.905	10992	769	679	14
4	Kab. Lampung Timur	1.774	9212	682	567	4
5	Kab. Lampung Utara	1.033	5737	457	383	9
6	Kab. Mesuji	418	2161	220	114	0
7	Kab. Pesawaran	775	3733	356	182	1
8	Kab. Pesisir Barat	303	1588	140	92	1
9	Kab. Pringsewu	652	4162	348	260	5
10	Kab. Tanggamus	1.06	5265	400	224	2
11	Kab. Tulang Bawang	683	3636	245	207	6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	468	2671	248	176	1
13	Kab. Way Kanan	824	4565	444	325	6
14	Kota Bandar Lampung	1.159	8108	631	883	4
15	Kota Metro	280	2281	186	229	3
Total	Total	13.318	74.956	6.011	4.968	68

Sumber: Dapodik Kemdikbud, 2020

Dari tabel tersebut diatas, dapat dicermati jika jumlah ketersediaan beberapa jenis ruang pada sekolah di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota nampak bervariasi. Ketersediaan ruang kelas hampir terpenuhi secara layak pada seluruh daerah dan ada beberapa daerah yang jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan sekolah pada daerah tersebut, seperti misalnya Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung. Namun demikian, ditemukan juga daerah yang masih minimal dalam penyediaan ruang kelas, contohnya Pesisir Barat dan Mesuji. Sementara itu pada ruang perpustakaan dapat teramati kondisi yang serupa, dimana pada daerah yang memiliki jumlah sekolah banyak maka memiliki ruang perpustakaan yang juga sepadan, walau belum mencakup keseluruhan sekolah. Ketersediaan ruang laboratorium nampak dalam kondisi serupa, dimana pada daerah dengan jumlah sekolah yang dominan cenderung memiliki

ruangan laboratorium yang sebanding, walaupun belum mencakup keseluruhan sekolah. Namun demikian, hampir semua sekolah masih memiliki kuantitas ruang praktik yang minim.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan tentu saja akan memberikan banyak pengaruh dalam beberapa hal. Yang pertama, Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pencapaian akreditasi bagi suatu lembaga pendidikan. Perlu diketahui bahwa sarana dan prasarana suatu pendidikan ternyata mempunyai pengaruh terhadap pencapaian akreditasi lembaga sekolah, yang mana hal ini dapat tercapai apabila manajemen sarana dan prasarana yang disediakan, diatur dan digunakan sesuai dengan fungsinya agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang jalannya pendidikan dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah bersama pemerintah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat yang diberikan kepada sekolah yang bersangkutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan terpenuhinya seluruh sarana-prasarana akan menunjang keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan.

Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hal itu dapat terjadi karena pada dasarnya sarana belajar merupakan media mutlak yang dapat mendukung minat belajar, kekurangan ataupun ketiadaan sarana belajar secara langsung telah menciptakan kondisi anak untuk malas belajar. Dapat disimpulkan jika siswa malas belajar akan berdampak buruk terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Dalam dunia pendidikan sarana dan prasarana sangat penting karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kriteria minimum untuk sarana menurut Permendiknas No.24 tahun 2007 adalah terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi, dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh sekolah. Sedangkan Kriteria minimum untuk prasarana belajar menurut Permendiknas No.24 tahun 2007 yaitu terdiri dari lahan, bangunan, ruang -- ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah.

Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan berpengaruh pada kepuasan siswa. Perlu diketahui sebelumnya Pembelajaran efektif adalah pembelajaran di mana siswa memperoleh keterampilan-keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap serta merupakan pembelajaran yang disenangi siswa. Untuk mencapai pembelajaran efektif diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional "Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik". Mutu layanan merupakan suatu tingkatan ukuran baik atau buruknya suatu layanan yang diberikan pihak sekolah kepada para siswa yang diharapkan sesuai dengan keinginan para siswa khususnya di bidang sarana dan prasarana.

Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah mempengaruhi kinerja guru Sarana. Prasarana pendidikan sebagai salah satu penunjang keberhasilan pendidikan, yang mengacu pada Standar sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Permasalahan sarana dan prasarana sangat penting untuk ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Bagi beberapa sekolah yang telah memenuhi sarana dan prasarananya akan meningkatkannya agar lebih baik lagi, hal ini adalah wajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

BAB V. KESIMPULAN

Pada penerapannya kami melihat penerapan KKNI di Indonesia belum dapat sepenuhnya dijalankan. Masih terdapat Gap yang jauh antara point pertama yaitu menyetarakan ilmu, keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan semakin cepat perkembangan dunia khususnya teknologi saya melihat semakin jauhnya Gap antara perguruan tinggi dengan dunia kerja khususnya di Indonesia. Tingginya pengangguran di Indonesia dan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ditekuni sekarang dengan background keilmuan yang dimiliki saat ini menunjukkan apa yang dicita-citakan dalam KKNI ini belum dapat tercapai. Menyongsong Pendidikan di era 4.0, maka mau tidak mau semua permasalahan laten di atas harus mampu dicarikan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, sebagaimana diutarakan di atas, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan. Menurut Rhenald Kasali, ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan di era 4.0 ini, yaitu *disruptive mindset*, *self-driving*, dan *reshape or create*.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi existing pendidikan menengah di Provinsi Lampung, dapat dipahami jika Keberadaan sekolah swasta dominan di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Hal ini mengindikasikan jika daerah tersebut memiliki daya tarik bagi sekolah swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, peran sosial dari beberapa sekolah swasta yang berafiliasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan juga mencerminkan upaya untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan pendidikan di daerahnya. Hal yang berbeda terjadi pada beberapa daerah dengan dominasi peran sekolah negeri, dimana daya tarik bagi swasta untuk masuk dan berkembang

masih dibatasi oleh kendala seperti infrastruktur dan lainnya. Sementara itu dominasi guru perempuan pada hampir semua daerah di Provinsi Lampung. Hanya ada beberapa daerah dengan komposisi guru laki-laki yang dominan, diantaranya Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Utara. Kemudian, ketersediaan beberapa jenis ruang pada sekolah di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota nampak bervariasi. Ketersediaan ruang kelas hampir terpenuhi secara layak pada seluruh daerah dan ada beberapa daerah yang jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan sekolah pada daerah tersebut, seperti misalnya Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung. Namun demikian, ditemukan juga daerah yang masih minimal dalam penyediaan ruang kelas, contohnya Pesisir Barat dan Mesuji. Sementara itu pada ruang perpustakaan dapat teramati kondisi yang serupa, dimana pada daerah yang memiliki jumlah sekolah banyak maka memiliki ruang perpustakaan yang juga sepadan, walau belum mencakup keseluruhan sekolah. Ketersediaan ruang laboratorium nampak dalam kondisi serupa, dimana pada daerah dengan jumlah sekolah yang dominan cenderung memiliki ruangan laboratorium yang sebanding, walaupun belum mencakup keseluruhan sekolah. Namun demikian, hampir semua sekolah masih memiliki kuantitas ruang praktik yang minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadah, A. (2019). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 77–88.
- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*, 0(0), Article 0.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2927>
- Anggraini, F. L., Hanurawan, F., & Hadi, S. (2018). Partisipasi Komite Sekolah pada Kegiatan Ekstrakurikuler. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(5), 544–551. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i5.10962>
- Arfani, L. (2018). MENGURAI HAKIKAT PENDIDIKAN, BELAJAR DAN PEMBELAJARAN. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 11(2), Article 2.
<https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5160>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- BPS Lampung. (2021a). *Rilis IPM Provinsi Lampung Tahun 2021*.
<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/954/ipm-provinsi-lampung-2021-mencapai-69-90.html>
- BPS Lampung. (2021b). *Statistik Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2021*.
<https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/1/indeks-pembangunan-manusia.html>

- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). DIGITAL INOVASI SEKTOR PUBLIK: EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM IMPLEMENTASI INOVASI DEGA DIGITAL. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127–145.
<https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.736>
- Fikri, A. (2019). Pengaruh Globalisasi dan Era Disrupsi terhadap Pendidikan dan Nilai-Nilai Keislaman. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 117–136.
<https://doi.org/10.32533/03106.2019>
- Lasmawan, I. W. (2019). ERA DISRUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI REPOSISI MAKNA DAN PRAKTEK PENDIDIKAN (KAJI PETIK DALAM PERSPEKTIF ELEKTIK SOSIAL ANALISIS). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 54–65. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i1.13>
- Mantja, W. (2016). Manajemen Pendidikan dalam Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2).
<https://doi.org/10.17977/jip.v7i2.612>
- Muninggar, A. M., Nugroho, F. A., Hadi, D. A., & Umayah, L. (2021). DAMPAK DISRUPSI PENDIDIKAN KARENA PANDEMI COVID-19 DI SMA MUHAMMADIYAH 2 PEMALANG. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 3(1), 65–76.
<https://doi.org/10.23917/blbs.v3i1.14319>
- Nugraha, G. A., & Baidi. (2021). Transformasi Manajemen Fasilitas Pendidikan Pada Era Disrupsi Teknologi. 7(2). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2621/1253>

- Patras, Y. E., Iqbal, A., Papat, P., & Rahman, Y. (2019). MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN TANTANGANNYA. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 7(2), 800–807.
<https://doi.org/10.33751/jmp.v7i2.1329>
- radarlampung, radarlampung co id. (2019, January 17). Mutu Pendidikan Lampung Masih Rendah. *Radarlampung.co.id*. <https://radarlampung.co.id/mutu-pendidikan-lampung-masih-rendah/>
- Radinal, W. (2021). PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DI ERA DISRUPSI. *AL FATIHAH*. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/ALF/article/view/27>
- Rustandi, R. (2019). KINERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 67–73.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1653>
- Salsabila, U. H., Ilmi, M. U., Aisyah, S., Nurfadila, N., & Saputra, R. (2020). Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi. *Journal on Education*, 3(01), 104–112. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i01.348>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA DARURAT COVID 19. *JURNAL MAPPESONA*, 2(2), Article 2. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/830>
- Sayyidi, S., & Sidiq, M. A. H. (2020). Reaktualisasi Pendidikan Karakter di Era Disrupsi. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 105–124.

Sulistio, E. B., & Hutagalung, S. S. (2021). *Disaster and Distance Learning: Exploratory Factors Analysis of Online Learning Effectiveness During Pandemic*. 319–323.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.045>